

BAB II

ISU SOSIAL-POLITIK DALAM NEGERI INGGRIS

Dalam bab ini akan dibahas mengenai isu-isu sosial dan politik dalam negeri Inggris. Ada beberapa isu utama dan beberapa isu pendukung yang berkembang dikalangan pemilih. Isu utama adalah *isu dukungan Inggris dalam invasi Amerika Serikat ke Irak serta isu nuklir Irak*.

A. Isu dukungan invasi Inggris ke Irak

Presiden Amerika Serikat, George W. Bush dan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair adalah dua tokoh yang berkoalisi dalam perang Irak dan sedang mengalami dilema atas kasus penyerangan ke Irak di dalam negerinya masing-masing. Konggres di Washington dan parlemen di London meragukan alasan pemimpin mereka memutuskan untuk maju perang. Alasan melakukan perang adalah karena Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal. Apakah betul demikian?. Apakah hal itu adalah alasan perang di Irak, atau mungkin tanpa disadari wakil-wakil rakyat ini telah memberi lampu hijau pada keinginan Amerika Serikat membentuk rezim baru di Bagdad?

a. Perdebatan Nasional mengenai keterlibatan Inggris dalam Perang Irak.

Perang Irak telah usai, tetapi implikasinya justru hebat. Di AS, Presiden George W. Bush didakwa telah melakukan kebohongan public karena tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massal oleh Irak berasal dari data intelejen yang salah. Pamor Bush pun merosot. Bush menghadapi ketidakpercayaan yang luar biasa dari publiknya sendiri. Blair dan Partai Buruh juga mengalami efek buruk perang Irak. Meskipun Inggris hanya membantu AS dalam agresi tersebut, tetapi pengaruhnya di

dalam negerinya sangatlah besar. Perdana Menteri Inggris Tony Blair adalah orang yang sedang merasakan bagaimana akibat dari apa yang telah dilakukannya, yaitu menurunnya kepercayaan publik yang terlihat dari hasil pemilu parlemen, dimana perolehan jumlah kursi parlemen Partai Buruh semakin menurun.

Di Inggris sendiri, parlemen semakin mempertanyakan apakah alasan untuk perang di Irak itu benar?. Dalam partainya sendiri, Partai Buruh, Tony Blair sudah dikecam. Rekan separtainya Menteri Kerjasama Pembangunan, Claire Short, mengatakan bahwa perdana menteri seorang penipu dan oleh karena itu sebagai pernyataan protes ia meletakkan jabatannya.

Mantan Menteri Luar Negeri, Robin Cook, juga meletakkan jabatannya sebagai ketua fraksi Partai Buruh dalam Majelis Rendah, karena menentang perang di Irak tanpa resolusi DK PBB. Menurut Cook senjata pemusnah massal itu tidak ditemukan karena memang Saddam Hussein tidak memilikinya. Menurut banyak anggota parlemen, kedua Dinas rahasia Inggris dan Amerika Serikat tahu bahwa Saddam tidak memiliki senjata pemusnah massal dan sudah menyampaikan hal itu pada Blair dan Bush.⁷

Blair juga menghadapi perdebatan parlemen tentang invasi ke Irak. Ketua Partai Konservatif (*oposisi*), Michael Howard, menuntut untuk mengetahui apakah PM disesatkan oleh dinas intelijen atau dia telah menipu rakyat Inggris. Jajak pendapat *ICM (ICM Direct Ltd)*, menunjukkan 55 persen responden menduga Blair berbohong mengenai Irak. Sedangkan 56 persen mengatakan invasi tersebut tidak dapat dibenarkan. Namun Blair tetap memenangi posisi untuk melanjutkan sepertiga

⁷“Parlemen Inggris mencecar Blair soal Irak” dalam http://www.rmw.nl/ranesi/html/blair_dicecar.html diakses 9 oktober 2011

masa jabatan pada pemilihan selanjutnya. ICW menunjukkan, Partai Buruh mendapatkan dukungan 35 persen, lima poin di atas Konservatif.⁸

Keterlibatan Inggris dalam perang di Irak sebenarnya tidak mendapatkan dukungan dari parlemen nasional, tetapi mengapa Tony Blair tetap mendukung Amerika Serikat dalam invasi ke Irak?. Yaitu dengan alasan adanya senjata pemusnah massal yang dimiliki Irak sehingga banyak protes dan kecaman dari para pejabat maupun anggota Partai Buruh sendiri yang diterima Tony Blair yang mengakibatkan popularitasnya menurun.

B. Isu Senjata Pemusnah Massal Irak

Diperkirakan ada dua hambatan utama yang menyangkut hubungan antara Irak dengan tim inspeksi PBB pada saat itu perdebatan perihal senjata pemusnah massal Irak mulai memanas dalam upaya penyelidikan dan penghancuran senjata tersebut. Yang pertama adalah sesuai dengan resolusi PBB no 687 menyangkut pemusnahan senjata massal Irak, tim inspeksi PBB (UNSCOM/United Nation Special Commission) memfokuskan upaya penghancuran senjata kimia, biologi dan kekuatan rudal balistik Irak pasca perang teluk II, namun kedua belah pihak yaitu Baghdad dan UNSCOM saat itu sama-sama melakukan kekeliruan cukup fatal dalam proses aktivitas penghancuran senjata pemusnah massal Irak. disatu pihak, Baghdad terkesan berusaha menyembunyikan kekuatan senjata pemusnah massalnya atau melakukan penghancuran secara sepihak tanpa pengawasan tim inspeksi PBB yang membawa dampak dan citra negatif setelah diungkap oleh menantu Saddam Hussein, Hussein Kamel Hassan, sewaktu lari ke Jordania. Di pihak lain, tim inspeksi PBB terlibat

⁸“Rakyat Inggris Merasa Dibohongi PM Blair” dalam <http://www.suaramerdeka.com/harian/0407/21/int03.htm> akses 10 oktober 2011

kegiatan mata-mata di Irak untuk kepentingan CIA dan Mossad seperti yang diungkapkan pemerintah Irak pada tahun 1998 yang berbuntut pengusiran terhadap UNSCOM oleh pemerintahan Saddam.⁹

Tim inspeksi PBB akhirnya bersedia memberikan laporan bahwa senjata pemusnah massal Irak telah hancur total dan Baghdad tidak memiliki lagi senjata jenis tersebut. Sebelum ini, perbedaan pendapat selalu muncul antara Irak dan tim inspeksi PBB tentang apakah senjata pemusnah massal Irak sudah hancur total atau seberapa kalau masih ada sisa. Dalam hal ini pihak yang menjadi korban tentu saja rakyat Irak karena menyebabkan sanksi PBB tidak bisa dicabut.

Hambatan yang kedua adalah tuduhan terus-menerus dari AS dan Inggris bahwa Irak kembali mengaktifkan program senjata kimia dan biologinya sejak berhentinya kerja tim inspeksi PBB pada bulan Desember 1998. AS dan Inggris melempar berbagai macam tuduhan terhadap Irak, misalnya menuduh Irak terus memproduksi senjata kimia dan biologi untuk tujuan militer dan senjata tersebut sudah dapat digunakan dalam jangka waktu 45 menit saja jika ada instruksi dari pimpinan Irak. Irak juga dituduh mengembangkan laboratorium tidak permanen yang bisa dipindah dari satu tempat ketempat lain, untuk riset dan produksi senjata kimia dan biologi. Irak dituduh pula menggunakan segala cara secara tidak legal untuk memperoleh bahan-bahan terlarang dari luar negeri.

Beberapa Negara barat, khususnya Amerika Serikat dan Inggris, mencurigai Irak telah memindahkan program senjata kimia dan biologinya ke sejumlah istana Presiden Saddam Hussein. Kecurigaan itu timbul lantaran pemerintahan Irak sejak

⁹“Kontroversi Senjata Kimia Dan Biologi Irak”, Dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0211/04/in/ont43.htm/> diakses tanggal 19 April 2012

awal tahun 1990-an, membangun secara besar-besaran istana presiden di seantero negeri Irak. sejumlah anggota UNSCOM sempat pula menuduh pemerintah Irak menggunakan sebagian istana presiden untuk keperluan riset dan pembangunan senjata kimia dan biologi.¹⁰

Berdasarkan resolusi baru 1441 yang dikeluarkan DK PBB pada 8 November 2002, akhirnya Irak bersedia membuka seluruh akses persenjataannya untuk diperiksa oleh tim inspeksi senjata PBB, yang pada awalnya resolusi 1441 ini mendapat reaksi keras dari parlemen Irak yang menolak resolusi tersebut. Bahkan duta besar Irak untuk PBB Mohammad Aldouri menuduh AS mendalangi resolusi tersebut. Ia menganggap resolusi ini merupakan keinginan Amerika Serikat dengan mengatasnamakan seluruh dunia. Resolusi baru ini memberi keleluasaan penuh pada PBB untuk memeriksa kepemilikan senjata di Irak.

Dalam rangka mematuhi resolusi 1441, pemerintah Irak mengirimkan deklarasi senjatanya ke PBB. Bagian utama dari deklarasi dari senjata Irak terdiri dari 11.807 halaman, termasuk dua bagian tambahan yang terdiri dari CD-rom 529 megabyte mengenai laporan Irak selama empat tahun, ketika para pengawas senjata PBB terdahulu yaitu UNSCOM tidak berada di Irak dan sebuah dokumen 325 halaman mengenai nasib monitoring jangka panjang dari tempat-tempat yang dicurigai.¹¹

Empat tim pemeriksa senjata internasional kenamaan seperti UNSCOM yang pada tahun 1998 pernah diusir dari Irak karena dituduh sebagai mata-mata oleh Irak, IAEA (*International Atomic Energy Agency*), IISS (*International Institute of Strategic*

Ibid.
Dhurorudin Mashad, *Saddam Melawan Amerika*, PT Grafika Indah, Jakarta, 2003, hal. 147

Studies), dan UNMOVIC (*United Nation Monitoring Verification and Inspection Commision*) telah memeriksa senjata terlarang milik Irak. namun demikian, laporan dari keempat tim tersebut tidak ada yang menyatakan bahwa Irak memiliki dan mengembangkan senjata nuklir, kimia, dan biologi.¹²

Dalam deklarasi selanjutnya yang dikirim pemerintah Irak ke PBB, Irak menyebutkan sekitar 13.000 bom kimia dijatuhkan pasukan Irak antara tahun 1983-1988, sementara sebelumnya pemerintah Irak telah mengumumkan bahwa sekitar 19.500 bom digunakan selama periode tersebut. Hasil temuan tim inspeksi PBB atas sejumlah roket kimia di Irak dan terdapat indikasi kuat bahwa Irak memproduksi Anthrax dalam jumlah besar dari yang disebutkan dalam deklarasi, menyebabkan Irak harus berusaha keras meyakinkan seluruh dunia bahwa deklarasi senjatanya benar-benar akurat dan bahwa Irak bersih dari senjata pemusnah massal.¹³

Sedangkan pada 14 Februari 2003, Ketua Badan Energi Atom International (*IAEA / International Atomic Energy Agency*), Mohammed Al-Baradai, melaporkan kepada DK PBB, bahwa timnya telah berusaha keras untuk mengenali kemampuan dasar nuklir Irak dan memeriksa dugaan aktivitas nuklir di sejumlah tempat yang belum diselidiki, menguji material nuklir dan peralatan pendukung, serta mengidentifikasi tempat-tempat sejumlah pejabat kunci Irak. hasilnya, Irak tidak terbukti memproduksi uranium dan tetap taat pada peraturan, serta tidak terbukti mengimpor uranium dari Afrika Selatan, seperti yang dituduhkan AS dan Inggris. Irak bahkan telah menyerahkan dokumentasi proyek pembuatan roket konvensional yang tidak dilarang PBB.

¹²Alauddin Al Mudarris, *Huru-Hara Irak Isyarat Akhir Zaman*, Cahaya Hikmah, Yogyakarta, 2004, hal. 48
¹³"Interview with Iraq Minister", Dalam <http://www.cnn.com/Iraq War Resume/> diakses pada tanggal 10 November 2003

Al-Baradai melanjutkan, bahwa mereka telah meneliti 32 ton bahan peledak HMX yang telah dideklarasikan Irak. ternyata bahan tersebut memang digunakan Irak untuk menghancurkan material-material penambangan di negara itu, sebagaimana yang dilansir Irak. selain Al-Baradai, ketua tim inspeksi senjata PBB (*UNMOVIC*) yang diketuai oleh Hans Blix juga menyampaikan laporannya: “Sejak tiba di Baghdad, kami telah melakukan lebih dari 400 inspeksi yang meliputi 300 tempat. Semua inspeksi berjalan tanpa kendala, dan pemerintah Irak selalu memberikan akses yang baik pada tim kami”. *UNMOVIC* telah memeriksa rudal *As-Samoud 2* dan *Al-fatah*. Irak juga menyetujui untuk mengurangi daya jangkauanya dari 180 km menjadi 150 km.

Selanjutnya Hans Blix menyatakan: “Tidak ada penyimpangan dari apa yang telah dideklarasikan Irak sebelumnya. Irak masih mematuhi resolusi PBB 687 dan 715, yang mengatur monitoring rudal yang bermasalah. Kami perlu pertegasan, bahwa tidak ada bukti yang ditemukan tentang adanya upaya Irak untuk mengembangkan senjata nuklir atau aktivitas nuklir lainnya, namun kami akan tetap menyelidiki lebih lanjut”.¹⁴

Dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada 5 Februari 2003, Dewan Keamanan kemudian memberikan tanggapan terhadap laporan yang diberikan Al-Badarai dan Hans Blix tersebut. Tanggapan yang paling tegas disampaikan oleh Perancis melalui Menteri Luar Negeri, Dominique de Villepen mengatakan bahwa penggunaan kekuatan perang terhadap Irak tidak dapat disahkan saat ini. Ada alternatif selain perang, yakni melucuti senjata Irak melalui inspeksi.¹⁵ Selain

¹⁴Alauddin Al Mudarris, *Huru-Hara Irak Isyarat Akhir Zaman*, Cahaya Hikmah, Yogyakarta, 2004, hal. 49
¹⁵“DK Bersidang Lima Jam, Usai Laporan Pemeriksaan Senjata”, Dalam
[p://www.kompas.com/kompas-cetak/0301/29/in/103350.htm/](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0301/29/in/103350.htm/) diakses tanggal 27 september 2011

tanggapan dari Negara lain, Duta Besar Irak untuk PBB Muhammad Ad-Dauri menyatakan bahwa pintu Irak selalu terbuka untuk tim inspeksi tanpa halangan apapun. Seluruh dunia pasti akan tercengang dengan jurang perbedaan antara tuduhan dan fakta dilapangan, begitu tanggapan yang dia berikan dihadapan DK PBB.¹⁶

C. Pro dan Kontra Kelompok Kepentingan

Hampir separuh dari orang Inggris menjadi anggota perkumpulan swasta. Perkumpulan-perkumpulan ini ada yang mempunyai perhatian terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah dan ada juga yang ingin mempengaruhi kebijakannya. Setiap organisasi (termasuk perusahaan dan bisnis) yang berusaha dengan caranya sendiri mempengaruhi kebijakan umum bisa disebut sebagai kelompok kepentingan atau kelompok penekan. Kelompok kepentingan di Inggris terdiri dari dua kelompok utama. Satu kelompok berusaha mempertahankan kepentingan-kepentingan ekonomi, kelompok lain berusaha memajukan masalah-masalah perdamaian, pelucutan senjata nuklir, atau untuk perlindungan anak-anak dan binatang. Meskipun demikian ada kelompok di antara keduanya yang berusaha mengkombinasikan kedua kelompok diatas.¹⁷

Secara umum yang menjadi fungsi kelompok kepentingan ini adalah untuk mempengaruhi pendapat umum melalui sebuah propaganda dan melancarkan kampanye untuk menentang kebijakan yang tidak sesuai atau berhaluan dengan kelompok-kelompok tersebut. Dalam rangka membina hubungan, kelompok kepentingan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalkan dengan membina hubungan melalui kontak formal maupun informal dengan pejabat pemerintahan

Ibid.
Harwanto dahlan, *opcit*, hal 28.

dengan permintaan suatu hal secara resmi membentuk komite-komite penasehat khusus atau melakukan konsultasi sebelum kebijakan keputusan.¹⁸

a. Propaganda Tony Blair

Masalah legalitas perang Irak kini menjadi pembahasan penting di tingkat politik dan media Belanda dan Inggris. Dua negara ini telah membentuk komisi pencari fakta guna membahas apakah perang Irak legal atau tidak. Dukungan pemerintah Belanda dan Inggris atas agresi Amerika ke Irak telah menjadi masalah yang cukup memusingkan bagi partai politik yang berkuasa di kedua negara ini. Pembentukan komisi-komisi pencari fakta di Belanda dan Inggris bersumber dari tekanan partai-partai oposisi dan atau justru untuk menjustifikasi langkah pemerintah.

Pemerintah Belanda lebih beruntung, karena saat mereaksi permintaan Bush untuk mengiringi Amerika menyerang, Amsterdam hanya memberikan dukungan politik. Sementara pemerintah Inggris ikut dalam membuat dokumen palsu guna menipu opini publik guna mengesankan perang Irak harus dilakukan, terhitung ikut dalam kejahatan pemerintah Amerika. Oleh karenanya, pernyataan para pejabat politik dan militer saat ini dan sebelumnya Inggris di hadapan anggota komisi pencari fakta perang Irak lebih disoroti ketimbang Belanda.

Publikasi laporan komisi pencari fakta perang Irak di Belanda membuat partai-partai oposisi pemerintah menuntut pengunduran diri Jan Peter Balkenende, Perdana Menteri Belanda. Balkenende tentu saja menolak tuntutan tersebut dan menegaskan bahwa keberadaan laporan komisi pencari fakta perang Irak yang

Harwanto Dahlan, *opcit*, hal. 28-30.

menyebut agresi ke negara ini ilegal dan menyakini bahwa dukungan Belanda atas perang Irak merupakan langkah yang membanggakan.

Partai-partai oposisi pemerintah tampaknya tidak akan menyepelkan laporan komisi pencari fakta perang Irak begitu saja. Kemungkinan mereka akan berusaha untuk menekan pemerintah Jan Peter Balkenende agar parlemen membentuk komite serupa menindaklanjuti laporan komisi ini. Diprediksikan selama beberapa pekan dan bulan mendatang tekanan terhadap Balkenende akan semakin meningkat agar ia segera mengundurkan diri, dan patut diketahui bahwa ini bukan untuk pertamakalinya pemerintah Belanda dituduh melanggar aturan internasional dan hak asasi manusia.

Dampak kehancuran dan korban yang jatuh akibat serangan ilegal Amerika dan Inggris ke Irak tidak kurang dari tragedi Srebrenica. Bila di Srebrenica terjadi pembantaian etnis sekitar 800 ribu warga sipil hanya dalam jarak 48 jam, rakyat Irak selama 6 tahun pendudukan Amerika telah menjadi korban. Selama itu pula sekitar satu juta lebih warga Irak menjadi korban dan lima juta menjadi pengungsi. Infrastruktur Irak hancur total dan belum ada tanda-tanda perbaikan kondisi ekonomi dan terealisasinya janji-janji Amerika merekonstruksi Irak.

Para pejabat Amerika dan Inggris pasca pendudukan Irak dan terbongkarnya kebohongan mereka soal ancaman senjata pemusnah massal Irak bagi keamanan dunia kemudian mewacanakan runtuhnya rezim zalim Saddam sebagai alasan dan motif agresi ke Irak. Yang menjadi pertanyaannya di sini, apakah esensi kezaliman rezim Saddam masih belum jelas bagi Amerika, Inggris dan Belanda di tahun 2003? Siapa yang tidak mengetahui bagaimana Amerika dan sekutu Eropanya menjadi pendukung terbesar politik, harta dan militer rezim Saddam dalam menyerang Irak. Perang yang telah mengambil korban ratusan ribu orang warga sipil dan ratusan miliar

dolar tercatat sebagai kerugian yang diderita Irak. Inggris telah berpartisipasi atau meluncurkan tiga perang dalam satu dekade terakhir, yang semuanya dimulai berdasarkan sejumlah kebohongan. Pemerintah Inggris di bawah Tony Blair berbohong kepada rakyatnya, ketika bergabung dengan pasukan koalisi untuk meluncurkan invasi ke Afghanistan setelah peristiwa 11 September 2001.

Blair menggelar sebuah propaganda media besar-besaran untuk membujuk rakyat Inggris bahwa Taliban dan Al Qaeda berada di balik serangan tersebut. Pemerintah London kemudian menggunakan ideologi ekstremis Wahabi untuk menipu rakyat Inggris agar mereka percaya bahwa jika kelompok radikal di belakang peristiwa 11 September, tidak dihentikan, mereka pasti akan meluncurkan serangan serupa di wilayah Inggris. Padahal Wahhabisme sendiri merupakan produk dari konspirasi Inggris, dengan tujuan menghancurkan Islam selama abad ke-18.

Sekarang, lebih dari satu dekade setelah invasi, keraguan muncul satu demi satu tentang motif di balik serangan. Lagi, pada bulan Maret 2003, pemerintah Blair berbohong tentang diktator Irak, Saddam Hussein, ketika dia menyatakan bahwa kami harus melancarkan serangan terhadap Irak karena rezim Baghdad memiliki senjata pemusnah massal, yang bisa diaktifkan dalam waktu 45 menit. Motif sebenarnya di balik perang itu tidak ada hubungannya dengan senjata pemusnah massal, tapi semua seputar kontrol Amerika Serikat atas sumber daya minyak Irak dan memperkuat kehadiran mereka di Timur Tengah.¹⁹

Pada tahun 2003 Amerika dan sekutunya melihat rezim Saddam sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu mereka memperkenalkan rezim ini sebagai ancaman bagi dunia. Di balik isu ini, mereka ingin militernya hadir langsung di Teluk Persia dan mengontrol daerah strategis ini. Benar apa yang dikatakan oleh anggota komisi pencari fakta perang Irak Belanda yang menyebut Amerika punya dua undang-undang, pertama khusus untuk mereka dan kedua undang-undang untuk seluruh dunia. Bagi Amerika dan sekutu-sekutunya kepentingan mereka yang menjadi tolak ukur. Buat mereka, aturan Internasional soal bantuan kemanusiaan juga tidak berarti bagi mereka. Selama di situ ada kepentingan mereka, keputusan ilegal mereka pun dijustifikasi, bahkan bangga dengannya. Namun yang lebih buruk lagi, mereka juga memaksa pihak lain untuk menerima argumentasi ilegalnya.²⁰ Kini, opini publik dunia pada umumnya tidak pernah lagi menerima apa yang disebut Barat krisis kemanusiaan sebagai alasan untuk mendukung tujuan jahat di balik intervensi militer di tempat lain di seluruh dunia.

b. Pro dan Kontra di PBB

Perserikatan Bangsa Bangsa atau biasa disingkat PBB adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington DC, namun Sidang Umum yang pertama dihadiri wakil dari 51 negara, baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House, London). Dari 1919-1946,

Perang Irak diakui Tidak Legal' dalam <http://www.kompas.com/telik.htm>. diakses tanggal 26 Januari 2012

terdapat sebuah organisasi yang mirip, bernama Liga Bangsa Bangsa, yang bisa dianggap sebagai pendahulu PBB.

Sejak didirikan pada tahun 1945 hingga 2011, sudah ada 193 negara yang bergabung menjadi anggota PBB, termasuk semua negara yang menyatakan kemerdekaannya masing-masing dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali Vatikan. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar-negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat. Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota (*non-member states*) dan termasuk pengamat permanen (*Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB*) Sekretaris Jenderal PBB saat ini adalah Ban Ki-moon asal Korea Selatan yang menjabat sejak 1 Januari 2007, menggantikan Sekretaris Jendral terdahulu, yaitu Kofi Annan dari Ghana.

Organisasi ini memiliki enam organ utama: Majelis Umum (*majelis musyawarah utama*), Dewan Keamanan (*untuk memutuskan resolusi tertentu untuk perdamaian dan keamanan*), Dewan Ekonomi dan Sosial (*untuk membantu dalam mempromosikan kerjasama ekonomi, sosial internasional dan pembangunan*), Sekretariat (*untuk menyediakan studi, informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh PBB*), Mahkamah Internasional (*organ peradilan primer*), Dewan Perwalian (*yang saat ini tidak aktif*).²¹

²¹'Perserikatan Bangsa Bangsa' dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa. diakses tanggal 27 Januari 2012.

Amerika Serikat sebagai negara super power yang menerapkan kebijakan pertahanan pre-emptive strike maka AS dapat dengan leluasa menanamkan pengaruhnya terhadap negara lain, dimana perubahan-perubahan di lingkungan strategis global tercermin dari besarnya peran negara tersebut. Semua isu dapat dimunculkan ke permukaan di negara-negara yang bukan menjadi sekutunya, karena AS melihat negara-negara tersebut sebagai halaman rumahnya yang dengan sesuka hatinya dia akan segera menyapunya. Seiring dengan berjalannya waktu, Amerika Serikat mulai berfikir menghadapi berbagai kondisi permasalahan untuk kepentingan negaranya. Antara lain dalam masalah kelangkaan energi yang dihadapinya di masa yang akan datang, dimana untuk menggerakkan roda perindustrian serta untuk menciptakan lapangan kerja di masa depan diperlukan suatu jaminan cadangan minyak yang cukup besar. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut hanya ada satu cara yaitu dengan invasi.²²

Pada saat Amerika Serikat mengalami tragedi WTC pada tanggal 11 September 2001 dengan serta merta AS melayangkan tudingan kepada negara-negara yang menjadi musuh nomor satu negara AS adalah Irak, Iran dan Korea Utara. Dengan tuduhan AS sebagai otak pelakunya tragedi WTC adalah jaringan Al-Qaeda yang walaupun bukti tersebut masih belum jelas sampai saat ini. AS menyatakan perang terhadap kelompok Al-Qaeda dan pendukungnya. Kemudian AS menuduh Irak mempunyai hubungan erat dengan jaringan Al-Qaeda, di samping itu pula Irak merupakan negara yang diduga memiliki senjata pemusnah massal yang dapat mengancam negara AS dan negara-negara lain di dunia. AS bahkan mampu meluaskan pengaruhnya terhadap PBB, segala keputusan atau kebijakan yang

"Analisa Operasi Udara di Irak" dalam. <http://iwojima94.blospot.com/2009/09/09/.html> diunduh 29 Januari 12.

dikeluarkan PBB tidak terlepas dari kepentingan negaranya. Semua kebijakan PBB yang tidak sesuai dengan kebijakan AS, akan dengan mudah AS menggunakan hak vetonya. AS mendesak Dewan Keamanan PBB agar segera mengeluarkan resolusi yang memberikan wewenang untuk menyerang Irak.

Amerika Serikat melancarkan kampanye dan propaganda dalam rangka mendapatkan dukungan Internasional dan anggota NATO untuk menyerang Irak dengan isu dimilikinya senjata pemusnah massal dan adanya keterkaitan Irak dengan jaringan teroris Al-Qaeda di Afganistan, bantuan dan dukungan Irak pada kegiatan pelatihan Teroris di Irak Utara. Atas tekanan dan desakan AS maka Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 1441 tanggal 8 November 2002 tentang pelucutan senjata pemusnah massal yang diduga dimiliki Irak. Resolusi PBB tersebut kurang mendapat respon dan tanggapan dari Irak, sehingga AS menganggap perlu menindak Pimpinan Irak dengan melakukan invasi ke Irak guna menggulingkan Pemerintahan Saddam Hussein. Pada tanggal 18 Maret 2003 Presiden Bush mengeluarkan ultimatum, bahwa Presiden Saddam Hussein dan keluarganya harus meninggalkan Irak dalam tempo 2 x 24 jam atau menghadapi serangan AS dan Sekutunya. Presiden Bush, menyampaikan pidato tentang perang ke Irak dimulai. "Pasukan Amerika dan koalisi sudah melancarkan operasi militer untuk melucuti Irak, untuk membebaskan rakyat dan melindungi dunia dari ancaman bahaya,".²³ kata Presiden Bush perang dimulai, Pada tanggal 20 Maret 2003 Rudal jelajah *Tomahawk* yang diluncurkan dari kapal perang AS di sekitar Teluk mulai menghantam sasaran-sasaran strategis di Irak yang diikuti jet pembom siluman F-117 *Nighthawk*

"Kompas 21 Maret 2003, Klipping Perpustakaan Seskoau, hal 27".

yang lepas landas dari Qatar dan Oman. Inilah yang menandai dimulainya serangan Udara AS ke Irak dengan sandi *Operation Iraqi Freedom*.²⁴

Pernyataan sikap Dewan Keamanan PBB yang mengutuk keras serangan militer AS ke Irak akhirnya keluar setelah dua minggu dimulainya serangan yang ditujukan untuk menggulingkan regim Saddam Hussein di Irak. Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, mengungkapkan penyesalan yang mendalam atas kegagalan PBB mencegah serangan tersebut. Menurut Annan, saat ini terdapat dua visi yang berbeda dalam sistem internasional yang perlu segera diatasi untuk menghindari konsekuensi serius yang lebih jauh. Selain itu, ditekankan tentang perlunya restorasi peran PBB melalui langkah spesifik yang dapat diambil oleh DK PBB untuk Irak

Kecaman yang diberikan oleh DK PBB tersebut ternyata ditanggapi dengan keras oleh pihak AS. Menteri Luar Negeri AS, Colin Powell menegaskan bahwa AS hanya akan memberikan peran terbatas kepada PBB dalam koordinasi dengan pemerintah interim Irak pasca penggulingan regim Saddam Hussein. AS tidak akan membiarkan PBB berwenang penuh.²⁵

Setidaknya ada dua hal yang dapat dilihat dari kondisi ini. Pertama, AS kian lama kian jelas menunjukkan superioritasnya dan sikap unilateralisme di dalam sistem internasional. Ketika pandangan sebagian besar komunitas internasional jelas menolak agresi militer AS ke Irak pada akhirnya disuarakan oleh PBB, AS bukan justru tunduk dan mendengarkan pandangan tersebut, tetapi sebaliknya justru mengecam PBB dengan menyatakan akan memberikan peran yang minimal kepada PBB dalam proses restorasi Irak pasca perang.

²⁴Operation Iraqi Freedom, Colonel Walter J. Boyne. First edition, November 2003, hal.14".
Kompas, 28 Maret 2003

Kedua, pada dasarnya tanggung jawab atas proses restorasi pasca perang di Irak memang merupakan tanggung jawab AS dan sekutu-sekutunya, terutama dalam segi biaya. Tetapi hal lain yang lebih penting daripada itu adalah tanggung jawab politik di dalam sistem internasional. Agresi militer AS ke Irak tanpa dasar yang kuat mendorong sebagian besar komunitas internasional untuk meyakini asumsi dari perspektif realis bahwa sistem internasional merupakan sistem yang bersifat *zero-sum game*. Artinya keamanan nasional suatu negara tercipta dengan mengorbankan keamanan nasional negara lain. Keamanan nasional AS akan dapat tercipta jika terjadi pergantian regim otoriter di Irak. Karena itu segala cara termasuk penggunaan kekuatan militer, yang seharusnya merupakan upaya *last resort* dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kondisi ini secara jelas akan menimbulkan ketakutan dari negara-negara lain bahwa sewaktu-waktu mereka juga dapat dijadikan sebagai sasaran jika dipersepsikan sebagai ancaman bagi keamanan nasional AS.

Kondisi ini akan menimbulkan suatu situasi *security dilemma* dan memicu negara-negara lain untuk meningkatkan kondisi keamanannya, antara lain dengan peningkatan kesiagaan kapabilitas militernya. Agresi militer AS ke Irak (*Operasi Pembebasan Irak*) semakin menjadi alasan bagi Korut untuk mempersiapkan kapabilitas militernya, terutama senjata nuklir untuk mengantisipasi kemungkinan serangan militer AS. Berbagai prediksi yang muncul tentang kemungkinan sasaran-sasaran AS berikutnya semakin memperparah spiral ketidakamanan di dalam sistem internasional. Seiring dengan itu, ancaman terorisme internasional yang diperangi AS sangat mungkin akan menjadi semakin marak karena meningkatnya sentimen anti-AS. Pada akhirnya, AS justru akan semakin merasa tidak aman.

Untuk mencegah kemungkinan terciptanya kondisi *security dilemma* tersebut, jelas peran PBB sebagai organisasi multilateral sangat diperlukan. Dalam hal ini, DK PBB khususnya, seperti diamanatkan dalam artikel 1(1) Piagam PBB, harus tetap mengemban tugasnya untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Saat ini, komunitas internasional perlu diyakinkan dan mendapatkan jaminan bahwa sistem internasional tidak bersifat *zero-sum* melainkan *win-win*. Artinya, keamanan internasional akan tercipta jika tercapainya keamanan nasional suatu negara tidak dilakukan dengan mengorbankan keamanan nasional negara lain.

Selain itu, prinsip kedaulatan nasional yang menjadi dasar dari institusi negara harus kembali dijunjung. Hak untuk menentukan kepemimpinan nasional di dalam suatu negara secara mutlak merupakan hak dari warganegaranya. Tidak boleh ada negara lain yang dapat mengambil alih fungsi tersebut dengan dalih apapun, karena kedaulatan nasional dan integritas teritorial suatu negara merupakan konsep keamanan yang paling hakiki dan tradisional. Dalam kondisi tertentu, intervensi ke dalam kondisi domestik suatu negara hanya boleh dilakukan dalam kerangka mekanisme multilateral dan dalam batas-batas yang disepakati bersama oleh komunitas internasional.